



Determinan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

Denisa Arta Uli M.P^{1*}, Nairobi², Arif Darmawan³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: ^{1*}denisa9925@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kendaraan bermotor, PDRB sektor transportasi, dan PDRB Perkapita terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB sektor transportasi, dan PDRB Perkapita terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor dan PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa. Sedangkan variabel PDRB sektor transportasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Jumlah Kendaraan Bermotor; PDRB Transportasi; PDRB Perkapita; Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract – This study aims to determine the effect of the number of motorized vehicles, GRDP in the transportation sector, and GRDP per capita on motor vehicle tax revenue in Java Island. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) website. This study uses multiple linear analysis methods to determine the influence of the variable number of motorized vehicles, GRDP in the transportation sector, and GRDP per capita on motor vehicle tax revenue. The results of this study indicate that the variable number of motorized vehicles and GDP per capita has a positive and significant effect on motor vehicle tax revenue in Java. While the transportation sector GRDP variable has a positive and insignificant effect on motor vehicle tax revenue on the island of Java.

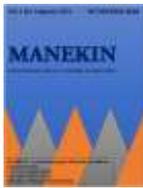
Keywords: Number of motorized vehicles; Transportation GRDP; GDP per capita; Motor Vehicle Tax Revenue

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang terjadi di Indonesia meningkat di setiap waktu baik dalam tingkat kota maupun desa. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yaitu cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan daerah diharapkan daerah tersebut dapat mengelola potensi yang ada secara maksimal bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dana sebagai pendukung setiap pembangunan baik secara nasional maupun tingkat daerah.

Membangun masyarakat yang adil dan makmur merupakan suatu cita-cita Luhur, tetapi juga merupakan sebuah tantangan yang berat mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang memadai. Namun hal tersebut belum cukup untuk membangun bangsa dan negara yang sebesar ini. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan yang terarah dan terencana (Gilarso, 2004). Menurut Deddy T. Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, maka dibutuhkan biaya yang besar. Yang mana salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari pajak. Menurut Undang-



Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai Semua pengeluaran termasuk untuk pengeluaran dalam sektor pembangunan. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999 memberikan dampak berupa reformasi pada bidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem pajak berupa pajak pusat dan pajak daerah.

Semua pajak diharapkan dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang bervariasi. Demi berhasilnya usaha pembangunan baik pusat maupun daerah, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Disisi lain, jumlah kendaraan yang terus meningkat di setiap tahunnya memiliki eksternalitas negatif. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Sektor transportasi merupakan sektor yang berkontribusi terhadap polusi udara perkotaan dan emisi gas rumah kaca. Konsentrasi tinggi polusi udara terkait transportasi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan pernapasan, kanker, dan tingkat kematian (WHO, 2016).

Di Indonesia, transportasi darat menyumbang hampir 90 persen dari polutan udara perkotaan (Yudha, 2017), serta sekitar 12 persen dari total emisi karbon dioksida nasional. Selain itu, eksternalitas negatif dari penggunaan kendaraan bermotor ini tidak hanya tentang emisi karbon dan polutan udara lokal saja tetapi mencakup juga kemacetan, kebisingan, dan kecelakaan. Untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan eksternalitas negatif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah Indonesia mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Instrumen PKB ini digunakan oleh Pemda untuk mengoreksi biaya sosial yang timbul dari eksternalitas negatif akibat pencemaran lingkungan yang di mana pencemar harus membayar akibat kegiatannya yang mencemari lingkungan. Untuk itu pajak kendaraan bermotor sangatlah penting. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pulau Jawa merupakan wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar dan terpadat diantara wilayah Indonesia lainnya. Karena jumlah penduduk yang begitu besar, maka akan mempengaruhi permintaan penduduk, khususnya pada permintaan jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua maupun empat.

Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Di Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Dalam Unit)

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	868.983	925.171	993.001	1.016.818	1.073.710
Jawa Barat	13.771.596	14.813.501	15.771.589	16.107.497	17.157.839
Jawa Tengah	15.990.989	16.937.984	17.793.289	18.099.368	18.811.820
DI Yogyakarta	2.591.744	2.725.253	2.861.419	2.910.802	3.024.065
Jawa Timur	19.423.725	20.505.772	21.595.399	22.001.528	22.861.292



Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banten	2.072.603	2.274.374	2.468.196	2.547.902	2.700.169

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 1 jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2021 jumlah keseluruhan kendaraan bermotor mencapai 65.628.895 juta unit. Dengan demikian, maka adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di tengah masyarakat akan memberikan dampak dan peluang bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raditya Nur Prawita (2018) yang menyatakan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Besarnya persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan Pajak Daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan Pajak Daerah terhadap pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 masih rendah yaitu dibawah 10 persen. Rata-rata sumbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 4,41 persen dan 1,93 persen. Dari 3 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hanya ada 2 kota yang sumbangan Pajak Daerah diatas 10 persen yaitu Kota Semarang sebesar 25,00 persen dan Kota Surakarta sebesar 13,55 persen, tetapi untuk sumbangan Retribusi Daerah masih dibawah 10 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing daerah.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah kendaraan bermotor, pendapatan perkapita, dan PDRB sektor transportasi. Besarnya peningkatan pajak kendaraan bermotor dari tahun-ke tahun di Pulau Jawa tidak terlepas dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan PDRB per kapita atau pendapatan masyarakat sehingga daya beli naik serta perkembangan sektor transportasi yang memberikan peningkatan pada PDRB sektor transportasi. Meningkatnya setiap faktor seperti jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, serta PDRB sektor transportasi dianggap sebagai faktor positif dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah pajak kendaraan bermotor yang besar berarti akan menambah jumlah penerimaan pajak. Namun demikian, patut dipertanyakan apakah meningkatnya jumlah seperti seperti jumlah kendaraan bermotor, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan PDRB sektor transportasi akan memberikan faktor positif atau negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh jumlah kendaraan bermotor, pendapatan per kapita dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa.

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Daerah penelitian yang digunakan adalah seluruh provinsi di Pulau Jawa yang terdiri dari 6 Provinsi. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Jumlah Kendaraan Bermotor, Produk Domestik Regional Bruto, dan PDRB Transportasi. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui BPS, juga sumber lain yang terkait seperti jurnal dan buku. Alat analisis digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel jumlah kendaraan bermotor, pendapatan per kapita, dan PDRB sektor transportasi adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan eviews 12. Adapun spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{LogPKB}_{it} = \text{Log}\beta_0 + \text{Log}\beta_1\text{JKB}_{it} + \text{Log}\beta_3\text{PDRB Transportasi}_{it} + \text{Log}\beta_2\text{PDRBperkapita}_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Log : Log-Linier

PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
JKB	: Jumlah Kendaraan Bermotor
PDRB per kapita	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRB per kapita	: PDRB sektor transportasi
i	: <i>cross section</i>
t	: <i>time series</i>
β_0	: konstanta
β_1, β_2, \dots	: koefisien regresi
μ	: <i>error term</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda(OLS) terhadap jumlah kendaraan bermotor, pendapatan perkapita, dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa diperoleh hasil estimasi regresi sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi

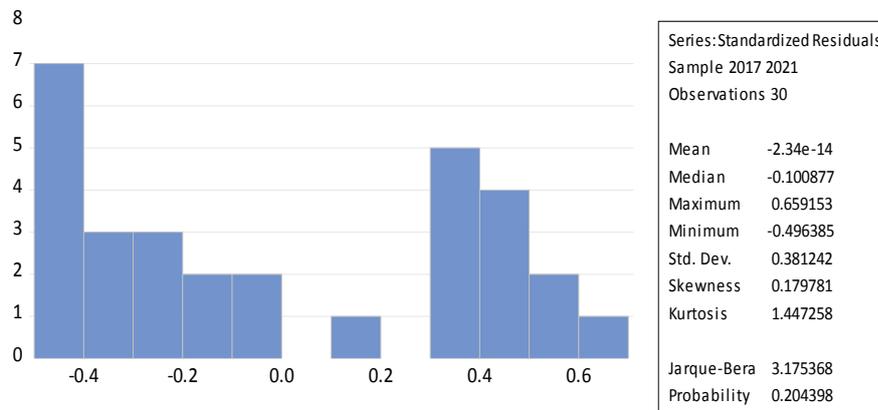
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.440906	4.028744	0.854089	0.4009
LNJKM	0.783363	0.169545	4.620385	0.0001
PDRBT	0.005026	0.040861	0.122996	0.9031
PDRBP	1.244929	0.276784	4.497844	0.0001

Sumber: Eviews 12

3.1 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Dengan program eviews, perhitungan normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber : Eviews 12



Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai p-value Jarque-Bera (0,204398) lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya hubungan antara variabel bebas didalam suatu model regresi. Berikut ini merupakan pangujian multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

	LnJKM	LnPDRBP	LnPDRBT
LnJKM	1	-0,632262	-0,670769
LnPDRBP	-0,632262	1	0,389920
LnPDRBT	-0,632262	0,389920	1

Sumber : Eviews 12

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa angka koefisien korelasi antar tiga variable bebas berkisar antara -0,632262 sampai dengan 0,389920. Menurut Widarjono (2018), pendugaan adanya masalah multikolinieritas pada model adalah jika koefisien korelasi berada diatas 0,8. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat masalah multikolinieritas dikarenakan memiliki nilai koefisien korelasi dibawah 0,8.

3.2 Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan membandingkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 5\%$ atau 0.05 atau dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel. Berikut ini hasil pengujian regresi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. Uji t

Variabel	t-statistik	t-tabel	Prob	Keterangan
LnJKM	4.620385	1,706	0.0001	Signifikan
LnPDRBT	0.122996	1,706	0.9031	Tidak Signifikan
LnPDRBP	4.497844	1,706	0.0001	Signifikan

Sumber: Eviews 12

1) Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai t-statistik (4.620385) < t-tabel (1.706) dan p-value (0.1487) > $\alpha = 5\%$ atau 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (JKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pulau Jawa Tahun 2017-2021.

2) Variabel PDRBT

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai t-statistik (0.122996) > t-tabel (1,706) dan p-value (0.0000) < $\alpha = 5\%$ atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto sektor Transportasi (PDRBT) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

3) Variabel PDRBP



Berdasarkan Tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai t-statistik (4.497844) > t-tabel (1.706) dan p-value (0.0053) < $\alpha = 5\%$ atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRBP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pulau Jawa Tahun 2017-2021.

b) Uji F

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Tabel 5. Uji F

f-stastik	f-tabel	Probabilitas	Keterangan
15.54979	2,99	0.4009	Tidak Signifikan

Sumber: Eviews 12

Pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai F-statistik (15.54979) > F-tabel (2.99) dan p-value (0.000000) < $\alpha = 5\%$ atau 0,05, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari JKM, PDRBT, PDRBP secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pulau Jawa Tahun 2017-2021.

c) Analisis Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Koefisien Determinasi

R-Square	Adjusted R-Square	S.E. of Regression
0.642117	0.600822	0.092556

Sumber: Eviews 12

Berdasarkan Tabel di atas nilai Koefisien Determinasi (R-Square) pada variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar 0.642117, hal ini menunjukkan bahwa semua variable independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 64,2% terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (variable dependen/terikat). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 35,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

3.3 Pembahasan

a) Pengaruh Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung 4.620385 dan nilai probabilitasnya 0.0001 ($P < 0,05$). Dengan hasil koefisien regresi bernilai 0.783363 yaitu menunjukkan jika semakin besar jumlah kendaraan akan meningkatkan jumlah PKB. Artinya setiap penambahan 1 persen kendaraan bermotor akan meningkatkan PKB sebesar 0.783363 persen. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ariasih,dkk. (2011) yang menjelaskan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB di provinsi Bali. Penelitian Geovani (2014) juga menunjukkan jumlah kendaraan berpengaruh positif terhadap PKB di Jawa Timur. Penelitian ini juga menegaskan penelitian Hasnuri (2014) yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi PKB di DIY pada tahun 2006 – 2013 dengan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PKB. Namun penelitian ini berbeda dari penelitian Rizal (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah kendaraan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PKB di Jawa Tengah pada tahun 1999- 2013. Jumlah kendaraan sebagai objek PKB merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi penerimaan disektor pajak di pemerintahan daerah. Sehingga semakin



besar jumlah kendaraan, maka semakin besar peluang untuk dapat menaikkan penerimaan pajak. Tentu hal ini diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan PKB lainnya.

b) Pengaruh Variabel PDRB Sektor Transportasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB transportasi berpengaruh positif Namun tidak signifikan terhadap PKB. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung 0.122996 dengan probabilitas 0.9031 ($> 0,05$). Dengan koefisien regresi 0.005026 yaitu menunjukkan bahwa menolak H_1 , yang berarti penambahan 1 juta pada PDRB sektor transportasi akan meningkatkan PKB sebesar Rp 0.005026, jadi penambahan PDRB sektor transportasi tidaklah begitu besar pengaruhnya terhadap PKB. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rizal (2016) yang membuktikan bahwa PDRB transportasi berpengaruh positif dan signifikan di Jawa Tengah pada tahun 1999- 2013. Penelitian Utami (2014) yang juga menunjukkan PDRB sektor transportasi menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB.

c) Pengaruh Variabel Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. Hal ini ditunjukkan dengan t hitung 4.497844 yang mempunyai probabilitas 0.0001 ($P < 0,05$). Dengan koefisien regresi 1.244929 maka arah pengaruhnya positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rizal (2016) di Jawa Tengah pada tahun 1999- 2013 menunjukkan hasil PDRB perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PKB. Namun berbeda dengan penelitian Iswandi (2014) menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB). Dalam hal ini variabel PDRB bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor disebabkan apabila berdasarkan harga konstan seluruh jenis usaha meningkat, berarti daya beli masyarakat tersebut dikatakan meningkat dan ekonomi di daerah tersebut juga dikatakan meningkat, maka dengan PDRB yang tinggi dan tingkat ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan kesadaran akan pembayaran pajak yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dituliskan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Jumlah kendaraan bermotor (JKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa periode 2017-2021
2. PDRB transportasi berpengaruh positif Namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa periode 2017-2021
3. PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Jawa periode 2017-2021.
4. Jumlah kendaraan bermotor (JKB), PDRB sektor transportasi, PDRB perkapita, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2017-2021.

REFERENCES

- Ajeng Kartini Apriliyanti, D., Harianto, & Budiman Hakim, D. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (2016). *Statistik Transportasi Darat 2016. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2017). Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin. *Kependudukan*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2017). *Statistik Transportasi Darat 2017. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.



- Badan Pusat Statistik (2018). *Statistik Transportasi Darat 2018. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2019). *Statistik Transportasi Darat 2019. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2021). *Statistik Transportasi Darat 2021. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Marpaung, Febriani Br. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan PDRB PER KAPITA Sebagai Moderating Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Gilarso. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta
- Habibie, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Izzuddin, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Malang. STIE MALANGKUCECWARA.
- Nur Prawita, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016. Universitas Islam Indonesia.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Prawita, Radiktya Nur. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2003). Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparmoko. M. 2001. Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah edisi pertama. Yogyakarta: andi Yogyakarta.
- Tikson, Deddy T. (2005). Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Makassar: Innawa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.